

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat majemuk dengan keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan. Konflik sosial menurut Coser (1956) didefinisikan sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Dalam perspektif sosiologis, konflik sosial seringkali muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, atau keyakinan yang tidak terkelola dengan baik, yang kemudian dapat mengancam kohesi dan integrasi sosial suatu masyarakat (Fisher, 2001).

Gambaran mengenai potensi ancaman terhadap integrasi sosial tersebut juga tercermin dari kondisi konflik sosial di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data Ditintelkam Polda Sumbar pada tahun 2025, tercatat sebanyak 98 kasus konflik sosial terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan 34 kasus terjadi di Kota Padang. Dari keseluruhan kasus tersebut, konflik yang berbasis keagamaan hanya tercatat terjadi sebanyak satu kali, namun peristiwa tersebut menunjukkan bahwa konflik berbasis nilai dan keyakinan tetap memiliki potensi dampak yang besar terhadap hubungan sosial di masyarakat.

Ancaman terhadap integrasi sosial akibat perbedaan keyakinan ini secara nyata terlihat dalam insiden yang terjadi pada 27 Juli 2025 di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Saat itu, kegiatan pengajaran agama Kristen yang diikuti oleh sekitar 30 anak dari Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugerah Padang diserang oleh sekelompok warga. Massa datang dengan emosi, membawa kayu dan batu, memaksa kegiatan keagamaan dihentikan, serta merusak bangunan tempat ibadah dengan berbagai alasan, termasuk dugaan pelanggaran terhadap aturan adat yang telah diwariskan turun-temurun. Insiden ini tidak hanya menimbulkan ketakutan bagi jemaat, tetapi juga memicu perdebatan mengenai toleransi, keberagaman, dan pentingnya dialog antarumat beragama di tingkat akar rumput (Ramsbotham, 2016). Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa

tanpa komunikasi yang terbuka dan pemahaman yang baik terhadap perbedaan, kesalahpahaman dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan. Prasangka yang tidak diselesaikan melalui komunikasi dapat merusak hubungan sosial yang telah lama terjalin.

Kasus di Padang Sarai tersebut merupakan cerminan dari tantangan makro yang dihadapi Indonesia sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi. Perbedaan agama, sebagai salah satu elemen identitas yang sangat fundamental, seringkali menjadi pemicu konflik sosial ketika tidak dikelola melalui komunikasi yang baik (Varshney, 2002). Menurut data Setara Institute (2024), kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan bahwa pengelolaan keberagaman melalui komunikasi antarumat beragama masih menjadi agenda penting.

Tantangan ini menjadi semakin kompleks ketika ditarik ke dalam konteks lokal Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, yang memiliki karakteristik sosial-budaya unik dengan sistem nilai Minangkabau. Namun, di tengah kuatnya nilai-nilai tradisional dan keagamaan mayoritas, keberadaan kelompok minoritas seringkali menghadapi tantangan dalam menjalankan aktivitas keagamaannya. Penelitian Mujiburrahman (2006) dan Crouch (2014) menunjukkan bahwa dalam masyarakat dengan identitas keagamaan mayoritas yang kuat, ruang dialog bagi kelompok minoritas seringkali terbatas, sehingga memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih strategis.

Pentingnya komunikasi strategis dalam resolusi konflik sosial telah menjadi fokus kajian ilmu komunikasi. Pendekatan restoratif (*restorative approach*) dalam penyelesaian konflik menekankan pada pentingnya proses komunikasi yang melibatkan semua pihak untuk mencapai pemahaman bersama, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial yang rusak (Braithwaite, 2002). Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada hukuman, pendekatan restoratif lebih menekankan pada perbaikan hubungan melalui dialog, empati, dan partisipasi aktif (Johnstone, 2011). Dalam konteks konflik sosial keagamaan, hal ini relevan karena tujuannya bukan hanya menghentikan konflik, tetapi juga membangun kembali kepercayaan (Lederach, 1997).

Keberhasilan pendekatan restoratif sangat ditentukan oleh proses komunikasi aktor-aktor yang terlibat. Aktor tersebut mencakup tokoh agama, pemerintah, aparat penegakan hukum, dan masyarakat yang berkonflik itu sendiri (Kim, 2004). Littlejohn & Domenici (2007) mengemukakan bahwa komunikasi konstruktif meliputi mendengarkan aktif, empati, keterbukaan, dan kemampuan mereframing masalah. Komunikasi yang menghargai keberagaman ini menjadi kunci mencegah kekerasan.

Dalam konteks mediasi, peran komunikator menjadi sangat krusial. Folger et al. (2021) mengidentifikasi bahwa fasilitator harus mampu menciptakan ruang komunikasi yang aman (*safe space*). Hal ini sejalan dengan konsep dialogic communication (Pearce, 2000), yang menekankan kualitas relasi, bukan hanya pertukaran informasi. Pendekatan dialogis ini efektif seperti yang didokumentasikan Bräuchler (2009) dalam rekonsiliasi di Maluku. Lebih lanjut, dalam studi komunikasi konflik, Putnam & Poole (1987) mengidentifikasi variasi proses komunikasi (*distributif, integratif, avoidance*). Penelitian Ting-Toomey (2005) tentang *face-negotiation theory* juga mengingatkan bahwa dalam budaya kolektif seperti Indonesia, pertimbangan "muka" atau kehormatan sangat krusial dan membutuhkan strategi yang sensitif.

Kasus perusakan GKSI Anugerah di Padang Sarai merupakan fenomena yang penting dikaji melalui lensa teori-teori tersebut. Pasca-insiden, berbagai pihak telah melakukan upaya-upaya penyelesaian konflik yang melibatkan komunikasi intensif di forum formal maupun informal (Cruikshank, 2006). Secara konkret, langkah-langkah tersebut mencakup fasilitasi mediasi oleh aparat kepolisian bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta koordinasi lintas institusi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga stabilitas situasi. Di luar jalur formal, proses komunikasi juga berlangsung secara kultural melalui keterlibatan tokoh masyarakat setempat yang berperan sebagai penengah dalam meredakan ketegangan. Dinamika ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada pendekatan struktural, tetapi juga pada efektivitas komunikasi sosial yang mampu membangun kembali kepercayaan antar kelompok yang terdampak konflik.

Penelitian mengenai proses komunikasi dalam restorasi konflik sosial keagamaan di Kota Padang masih sangat terbatas. Studi terdahulu lebih banyak membahas konflik dari perspektif sosiologis dan politik (Maarif, 2012). Padahal, pemahaman mendalam tentang komunikasi di tengah karakteristik budaya Minangkabau sangat diperlukan untuk mengembangkan model penyelesaian konflik lokal (Kriesberg, 2003). Hal ini sejalan dengan pandangan Galtung (2004) bahwa komunikasi adalah jantung dari transformasi konflik, dan Schirch (2005) yang menekankan pentingnya menyentuh dimensi emosional serta psikologis dalam konflik identitas.

Dalam konteks tersebut, kerangka teori dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan konseptual, tetapi juga sebagai alat analisis untuk memahami kompleksitas komunikasi dalam konflik berbasis nilai dan identitas. *Moral Conflict Theory* digunakan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan nilai, keyakinan, dan legitimasi moral menjadi sumber konflik serta memengaruhi cara aktor berkomunikasi dan memaknai situasi. Sementara itu, pendekatan komunikasi mediasi digunakan untuk menganalisis proses interaksi antar aktor yang dinegosiasikan menuju rekonsiliasi melalui ruang komunikasi yang aman dan inklusif. Dengan demikian, kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan konflik, tetapi juga mengungkap secara mendalam proses komunikasi dalam penyelesaian konflik secara restoratif.

Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam proses komunikasi aktor dalam upaya restoratif konflik sosial di Rumah Doa GKSI Anugerah Padang Sarai. Hal ini menjadi penting karena, meskipun upaya penyelesaian konflik telah dilakukan dan kondisi telah dinyatakan kondusif, belum dapat dipastikan sejauh mana proses komunikasi tersebut mampu menghasilkan pemulihan yang komprehensif.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap salah satu pengajar Rumah Doa GKSI, diperoleh informasi awal bahwa pasca konflik terjadi penyesuaian waktu kegiatan pembelajaran agama serta perubahan jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan tersebut. Temuan awal ini mengindikasikan bahwa proses pemulihan sosial belum tentu telah berlangsung secara optimal, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana

proses komunikasi antaraktor berperan dalam mendukung upaya restoratif pascakonflik.

Penelitian ini memanfaatkan *Moral Conflict Theory* untuk memahami bagaimana perbedaan nilai, keyakinan, dan legitimasi moral menjadi sumber utama ketegangan yang memicu konflik. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan teori mediasi komunikasi untuk mengkaji peran mediator dalam membangun ruang dialog yang aman, memfasilitasi pertukaran makna, serta mendorong tercapainya kesepahaman di antara para pihak yang berkonflik.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu komunikasi konflik, sekaligus kontribusi praktis dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik berbasis komunikasi yang lebih efektif. Lebih lanjut, penelitian ini juga berupaya mengisi kekosongan literatur dengan menyoroti bagaimana pendekatan restoratif dinegosiasikan secara kontekstual di tengah dominasi nilai lokal yang selama ini belum banyak dikaji secara spesifik dalam perspektif komunikasi konflik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan, “Bagaimana proses komunikasi aktor dalam restoratif konflik sosial pada Rumah Doa Gksi Anugerah Padang Sarai Kota Padang?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Menganalisis proses komunikasi yang melatarbelakangi terjadinya konflik sosial di Rumah Doa GKSI Anugerah Padang Sarai.
2. Menganalisis proses komunikasi aktor-aktor yang terlibat dalam restoratif konflik sosial pada Rumah Doa GKSI Anugerah Padang Sarai Kota Padang.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses komunikasi aktor dalam restoratif konflik sosial pada Rumah Doa GKSI Anugerah Padang Sarai Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis berikut:

Manfaat akademis teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu komunikasi, terutama komunikasi di bidang restoratif konflik sosial, khususnya yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Adapun manfaat praktis adalah sebagai berikut:

Manfaat praktis penelitian ini mencakup beberapa aspek krusial diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Padang dalam menyusun kebijakan pengelolaan konflik sosial. Selain itu, dapat menjadi referensi bagi para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam memfasilitasi dialog antarumat beragama untuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Temuan ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah keragaman keagamaan, sekaligus menjadi bahan pembelajaran bagi organisasi keagamaan dalam membangun komunikasi yang inklusif dengan masyarakat.

